

TEORI-TEORI POLITIK



GRAHA ILMU

TEORI-TEORI POLITIK

P. Antonius Sitepu

TEORI-TEORI POLITIK

Penulis: P. Anthonius Sitepu

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2012

Hak Cipta © 2012 pada penulis,
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Sitepu, P. Anthonius

TEORI-TEORI POLITIK/P. Anthonius Sitepu

-Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012

X + 178 hlm, 1 Jil.: 26 cm.

ISBN: 978-979-756-834-4

1. SOSIAL POLITIK

I. Judul

KATA PENGANTAR

Buku ini menggunakan judul *Teori-teori Politik*. Namun dalam hubungan ini hendaknya terlebih dulu dipahami mengenai makna teori yang dimaksudkan oleh penulisnya. Oleh sebab itu, di dalam wacana dan kepustakaan Ilmu Politik, penggunaan kata atau terminologi Teori Politik di dalam berbagai literatur atau *textbook* tidak selalu memiliki makna yang sama persis. Paling tidak ada dua makna yang berbeda di antara literatur-literatur yang menggunakan judul *Teori-teori Politik* atau kata Teori Politik dalam judul yang dipergunakan. **Pertama**, teori politik di dalam sebuah literatur bermakna sebagai ide-ide dan pemikiran filsafat politik. Di dalam kita akan menemukan pemikiran para filsuf tentang kekuasaan, negara, hubungan antara negara dan masyarakat, kelembagaan dan norma-norma (ideologi politik) untuk menjalankan kekuasaan. **Kedua**, teori politik dimaknai atau dimaksudkan sebagai hukum pergerakan antar - variabel yang dapat dipergunakan untuk menangkap dan menjelaskan isu suatu fenomena politik.

Buku ini menggunakan jenis makna yang pertama. Dengan memaknai teori politik sebagai pemikiran para filsuf tentang negara, kekuasaan, hubungan antara negara dan masyarakat, ideologi politik dan hal-hal yang berkenaan dengan norma-norma untuk menjalankan kekuasaan. Oleh sebab itu dalam hubungan ini, teori dimaknai sebagai generalisasi yang bersifat abstrak mengenai beberap fenomena. Dalam rangka menyusun generalisasi tersebut, teori senantiasa menggunakan sejumlah konsep-konsep. Konsep-konsep itu lahir dari pikiran (*mind*) manusia. Karena itu, konsep juga adalah bersifat abstrak. Konsep, merupakan unsur yang penting dalam rangka usaha kita untuk mengerti tentang dunia sekeliling kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik dimiliki oleh fenomena itu. Jadi dengan demikian konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas. Atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapatlah dirumuskan generalisasi. Dan biasanya konsep itu dirumuskan ke dalam satu atau dua kata. Seperti misalnya kita menggunakan dua konsep. Konsep *kemakmuran* dan konsep *legitimasi*. Hubungan apa yang bisa dibuat antara dua konsep dasar itu. Kita dapat membangun pernyataan sederhana: "ketika ekonomi makmur, maka legitimasi pemerintah akan meningkat". Dalam konteks ini kita dapat membangun generalisasi. Generalisasi jika dilihat dari strukturnya, maka dengan pasti generalisasi menyatakan suatu hubungan (relasi) antara dua yang dikandung oleh sebuah generalisasi adalah seperti yang dikatakan oleh Alan Isaak (1981:105-109) bersifat kondisional.

Suatu generalisasi saintifik, adalah pernyataan (*statement*) tentang hubungan empirik antara konsep-konsep dalam bentuk kondisional. Untuk memahami pengertian ini, lihat contoh berikut. Misalnya (M) dan (D) adalah konsep yang mewakili “makmur” dan “demokratis” dan (X) adalah negara. Maka dari sini bisa dibangun sebuah generalisasi. “Untuk setiap (X), jika (X) = (M) maka (X) = (D)”. Atau dengan perkataan lain, setiap negara yang memiliki atribut “makmur” juga memiliki sifat “demokratis”. Generalisasi seperti ini bisa saja dinyatakan sebagai “Jika (X) = (M) maka 75% kemungkinan (X) = (D)”. Artinya, 75% negara yang makmur, punya kemungkinan menjadi demokratis. Taupun setiap (M) = (D). Artinya, setiap negara makmur adalah negara demokratis. Kedua pernyataan (*statement*) itu secara logika tidak berbeda. Jadi dengan demikian, generalisasi secara struktural ditandai oleh bentuk kondisional, “jika . . . maka. . .” Generalisasi yang paling tinggi derajat generalisasinya dinamakan dengan teori.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dan juga fenomena yang bersifat politik. Atau dengan perkataan lain, bahwa teori politik itu adalah bahasan dan renungan atas:

1. Tujuan dari kegiatan politik,
2. Cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan,

Kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya. (Budiardjo, 2008: 43)

Teori politik, ini bisa didefinisikan sebagai refleksi sistematis terhadap sifat dan tujuan pemerintahan yang biasanya melibatkan pemahaman tentang institusi politik dan pandangan tentang bagaimana institusi tersebut mesti diubah. Teori politik merupakan suatu aktivitas intelektual yang sudah ada sejak lama, setidaknya sejak masa Yunani Kuno dan juga dipaparkan di dalam serangkaian karya-karya klasik mulai dari *Republic*, karya Plato (427-347) SM, hingga *Consideration on Representative Government* oleh John Stuart Mill.

Buku ini ditampilkan untuk mendefinisikan atau merumuskan, membangun batasan terhadap terminologi-terminologi seperti yang terdapat di dalam teori politik (*political theory*), filsafat politik (*political philosophy*) dan ideologi politik (*political ideology*) dan untuk mengklarifikasi pengertian daripada terminologi-terminologi khusus yang sangat beraneka ragam yang dipergunakan oleh ahli-ahli ilmu politik. Seperti kebanyakan buku atau literatur yang berjudul Teori Politik (Klasik maupun Kontemporer) buku ini juga terinspirasi oleh anggapan adanya kebutuhan. Hingga beberapa saat sebelumnya saya sebagai pengajar teori politik, memiliki sejumlah pilihan yang barangkali tidak dapat memuaskan dalam menentukan bacaan atau tema yang terdapat di dalam buku ini.

Pilihan lain yang dapat dipergunakan dalam menyusun buku ini adalah dengan menggunakan beberapa teks atau literatur tentang suatu teori politik tertentu. Teori-teori politik yang terdapat dalam buku ini adalah merupakan tema atau isu-isu kebanyakan pengajaran yang dilakukan oleh para teoritikus dan filsuf-filsuf politik sekarang ini. Dengan demikian, buku yang berjudul Teori Politik adalah yang berisikan karya pilihan yang mengikuti pola buku-buku teks sejarah pemikiran politik Barat. Maka selanjutnya dalam buku ini yang dikembangkan adalah seputar teori politik tentang negara, kekuasaan, sistem politik, elite politik, pemerintahan dan demokrasi. Ini semula merupakan materi kuliah Teori Politik yang disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa jurusan Ilmu Politik FISIP USU sejak tahun 2001. Hampir sepenuhnya bahannya diambil dari kajian teoritis berdasarkan studi kepustakaan. Dan kehadiran buku ini seperti yang disinggung di muka, didorong oleh

kenyataan yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan bacaan ilmiah tentang teori politik masih relatif sedikit secara utuh (terdapat banyak tema-tema yang bersifat teori politik tersebar di dalam buku-buku yang ada yang membahas tema-tema sebagaimana halnya yang terdapat dalam buku ini) dan di antara buku-buku yang telah diterbitkan terlebih dulu, masih ada terasa semacam celah yang perlu ditutupi. Dengan kehadiran buku ini, dianggap sebagai yang dapat menutupi kekurangan tersebut.

Medan, Oktober 2011

P. Anthonius Sitepu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PERSPEKTIF TEORI POLITIK	1
Landasan Konseptual Tentang Politik	1
Politik Sebagai Pemerintahan	4
Politik Sebagai Kehidupan Publik	6
Politik Sebagai Studi Kekuasaan	7
Konsep-konsep Politik	8
Cara Pandang Klasik	8
Cara Pandang Kelembagaan	9
Cara Pandang Kekuasaan	10
Cara Pandang Fungsionalisme	11
Cara Pandang Konflik	12
Kerangka Teori	13
Kerangka Konsep	15
Generalisasi	16
Teori Politik	17
BAB 2 STUDI TEORI POLITIK TENTANG NEGARA	23
Perspektif Teoritik Tentang Negara	23
Analisis Tentang Negara	40
Negara Sebagai Konsep Politik	42
Teori Asal Mula Negara	43
Negara dan Kekuasaan	46
Negara dalam Legitimasi Theologis	48
Negara dalam Legitimasi Ontologis	49
Teori Kekuasaan Politik Negara	51
Dimensi-dimensi Kekuasaan	52
Sumber-sumber Daya Kekuasaan	54
Konsep Distribusi Kekuasaan	56
Dasar Teoritik Negara dan Masyarakat Sipil	58

	Trias Politika dan Kekuasaan Negara	65
	Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan	70
	Badan Eksekutif dan Sistem Politik Indonesia	75
	Eksekutif dan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin	76
	Eksekutif dalam Sistem Politik Orde Baru	77
BAB 3	TEORI POLITIK ELITE POLITIK	81
	Teori Elite Politik	82
BAB 4	PERILAKU POLITIK, PEMILIH DAN PARTISIPAN POLITIK	87
	Konseptualisasi Perilaku Politik	87
	Perilaku dan Partisipasi Politik	88
	Model Perilaku Politik	89
	Perilaku Pemilih	90
	Teori-teori Perilaku Pemilih	90
	Teori Partisipasi Politik	92
	Bentuk Bentuk Partisipasi Politik	98
BAB 5	TRANSFORMASI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM POLITIK	103
	Dalam Perspektif Sistem Politik Indonesia	103
	Kerangka Konsep Eksekutif	114
	Konsep Sistem Politik	115
	Masalah Input dan Output Sistem Politik	118
	Lingkungan Sistem Politik	121
	Lingkungan dalam Masyarakat (<i>Intra Societal Environment</i>)	121
	Lingkungan Luar Masyarakat (<i>Extra Societal Environment</i>)	124
	Sistem Politik Indonesia	125
	Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan Umum	136
	Parlemen dalam Sistem Politik Indonesia	140
	DPR dan Sistem Politik Indonesia	143
	Mekanisme Hubungan Antara	144
BAB 6	TEORI PEMERINTAHAN	147
	Pengertian Pemerintahan	147
	Bentuk Pemerintahan	148
BAB 7	TEORI IDEOLOGI POLITIK	155
	Apakah Ideologi Politik itu	155
	Pemikiran Ideologi Liberalisme	159
	Pemikiran Modern Tentang Demokrasi	163
	Negara dalam Legitimasi Theologis	165
	Negara dalam Legitimasi Ontologis	166
	Niccolo Machiavelli (1469-1527)	166
DAFTAR PUSTAKA		175